
MENIMBANG KEISTIMEWAAN SEKOLAH MENUJU IDEALITAS SISTEM PENDIDIKAN

Oleh : Matkur

Abstract

The meaning of education has been narrowed to be school system, so those who do not go to school are considered as uneducated people. It distorts the substance of the meaning of education. Indeed it results in the exclusion of some national generation that, by chance, come from out of school system to take part in national constellation. Therefore, many criticisms are addressed to school system, as written by Reimer in his 'School is Dead'. Yet, those criticisms do not bring about significant changes, because people have been addicted to school system that gets much privilege from the government. This article tries to offer a change in educational system by removing the privilege from school.

Pendahuluan

Sebelumnya kami kemukakan pada pembaca bahwa tulisan ini merupakan hasil pengamatan dan penemuan terhadap fenomena yang terjadi pada suatu lembaga pendidikan yang biasa kita sebut sekolah. Pengamatan kami diarahkan pada eksistensi dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat, dalam rangka menemukan sistem yang lebih ideal untuk diterapkan.

Kita sudah mafhum bahwa pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang ingin mengasah potensi yang ada sejak manusia lahir. Tanpa pendidikan yang baik maka besar kemungkinan persaingan antara potensi yang baik dengan potensi yang buruk dimenangkan oleh potensi yang buruk. Oleh karena lingkungan selalu menawarkan hal yang baik dan yang buruk secara beriringan. Maka tergantung manusianya sendiri berupaya menggapai sesuatu yang baik, melalui proses pendidikan.

Pendidikan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu melalui proses kelembagaan dan melalui proses mandiri (autodidak). Kita

mengenal tiga lembaga yang bertanggung jawab dalam pendidikan yaitu, pertama, keluarga; Kedua, Masyarakat dan ketiga, sekolah.

Pada awalnya kita memahami bahwa keluarga adalah lembaga pertama dan yang utama dalam melaksanakan proses pendidikan. Sedangkan lembaga yang lain hanyalah membantu tugas keluarga apabila keluarga tersebut tidak memiliki waktu cukup untuk melakukan proses pendidikan pada anak-anaknya. Konsepsi mengenai tanggung jawab pendidikan itu mengalami perkembangan hingga sampai pada pemahaman bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan sekolah.

Namun pada realitasnya, sekolah menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menyelenggarakan proses pendidikan. Persepsi itu sangat kuat tertanam pada masyarakat, sehingga ada anggapan bahwa yang tidak menempuh pendidikan sekolah layak disebut tidak berpendidikan. Predikat tersebut diterima begitu saja terlepas

suka atau tidak suka, meskipun akan menyengsarakan orang yang menerima predikat tersebut. Ia akan terkatung-katung lantaran ditolak lamaran pekerjaannya gara-gara ia disebut tidak berpendidikan dan secara otomatis dia tidak mendapatkan ijazah.

Dari fenomena di atas maka dapat kita lihat reaksi masyarakat yang begitu "menuhankan" sekolah. Karena sekolah dianggapnya si pemberi kehormatan-karena yang bersekolah akan lebih dihormati daripada yang tidak bersekolah-, si pemberi pekerjaan -karena pekerjaan bisa diperoleh dengan mudah menggunakan ijazah, terlepas ia memiliki kemampuan atau tidak. Makin tinggi jenjang sekolah yang dilalui maka makin makmur pula kehidupannya sehingga orang berlomba-lomba bersekolah setinggi mungkin, yang hampir kesemuanya berniat untuk memperbaiki nasib.

Ketika kita melihat kondisi jaman sekarang di mana segala kebutuhan hidup serba mahal, tentunya hal itu merupakan sesuatu yang memberatkan bagi masyarakat yang secara kebetulan ditakdirkan menjadi orang yang lemah secara ekonomi. Melihat kondisi yang seperti itu, rasio kita bertanya, masih mungkinkah orang-orang melarat itu berpikir untuk sekolah, karena biaya sekolah sangat mahal. Sedangkan untuk makan saja mereka seakan-akan sudah kehabisan akal untuk mendapatkannya, sampai-sampai tubuhnya rela beralih fungsi menjadi mesin yang tak kenal lelah.

Kalau seperti itu adanya maka selamanya sekolah hanya untuk mereka yang memiliki harta banyak. Dampaknya juga pekerjaan yang layak hanya diperuntukkan bagi yang orang kaya. Bagaimana nasib si miskin? .

Kita tinggalkan sejenak

ketidakadilan yang diterima oleh si miskin, mari kita lihat mereka yang berhasil dijerat masuk pada sistem sekolah. Ternyata mereka tidak semuanya berhasil sesuai dengan apa yang menjadi motif mereka memasuki sekolah. Sedangkan mereka sudah terlanjur berandai-andai untuk hidup enak, dihormati oleh orang banyak dan pada kenyataannya hal itu tinggal mimpi karena setelah ia lulus tidak jauh beda dengan mereka yang tidak sekolah (menganggur) atau bahkan lebih parah.

Peristiwa di atas tidak susah kita jumpai di masyarakat bahkan kuantitasnya cukup banyak yang biasa kita sebut dengan pengangguran intelektual sehingga tidak aneh rasanya jika melontarkan pertanyaan, siapakah yang layak dipersalahkan? Mungkin jawaban yang cukup gampang adalah menyalahkan sistem. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pada tulisan ini kita dikaji semua persoalan tersebut untuk dalam rangka menemukan akar permasalahan guna dijadikan acuan membenahi system yang salah.

Eksistensi Sekolah dalam Sorotan

Ada ungkapan yang cukup terkenal dari Margaret Mead yaitu "nenek ingin aku memperoleh pendidikan karenanya ia melarangku bersekolah". Suatu ungkapan yang bernada minor di tengah-tengah masyarakat yang mengagungkan sekolah, dimana masyarakat menganggap seseorang memiliki pendidikan apabila mereka bersekolah dan sebaliknya apabila mereka tidak bersekolah maka disebut tidak berpendidikan. Hal itu sudah menjadi ideologi masyarakat yang ditanamkan oleh sekolah. Lebih dari itu menurut Illich (2000: 4) di Meksiko, kaum miskin dirumuskan

sebagai orang yang tidak menempuh pendidikan sekolah selama tiga tahun dan di New York orang miskin adalah orang yang berpendidikan sekolah di bawah dua belas tahun.

Dogma-dogma di atas seakan-akan sudah menjadi kebenaran yang harus diyakini dan diamalkan oleh masyarakat. Hal itu bisa dipahami karena memang kebenaran selalu berkolaborasi dengan kekuasaan. Sejalan pula dengan apa yang dirumuskan Gramsci yang dikutip oleh Freire (2001: 30) bahwa setiap hubungan pedagogis mengandung hubungan hegemonik. Hubungan pedagogis melibatkan hubungan kekuasaan dan dominasi. Dominasi di sini tidak dipahami secara eksklusif sebagai paksaan, bukan pula sekedar penggunaan kekuasaan eksternal, tetapi juga dan pada dasarnya sebagai konsensus atau bentuk penaklukan terhadap keinginan kelas atau massa sub ordinatif.

Oleh karena kekuasaan, dalam hal ini negara-berpihak kepada sekolah, maka sudah pasti ia akan menggunakan sistem kekuasaannya untuk mendukung dan makin memperkuat dominasi sekolah untuk menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menyelenggarakan proses pendidikan. Sebagai contoh, untuk menjadi pegawai negeri seseorang harus memiliki ijazah. Dan melebar pada segmen yang lain baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Bahkan untuk mejadi buruhpun harus memiliki ijazah dan besar kecilnya gaji atau bayaran ditentukan tinggi rendahnya jenjang sekolah yang ditempuh, bukan melihat pada bobot pekerjaan dan kapasitas profesionalnya.

Karena sekolah mendapat privilegес dari pemerintah maka banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk bersekolah sehingga ia menjadi

satu-satunya lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Realitas tersebut sering kali menjadi pemicu sekolah melakukan program-program yang bertentangan dengan harapan dasar keluarga dan masyarakat, karena lemahnya kontrol keduanya terhadap sekolah.

Untuk melihat lebih jauh eksistensi sekolah pada saat ini, marilah kita fokuskan pada lima hal berikut :

Pertama, tujuan. Orientasi siswa/masyarakat dalam bersekolah sering kali bukan untuk menempa diri dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi orang yang dewasa secara jasmani dan rohani, melainkan untuk mendapatkan ijazah sebagai prasarat untuk mendapat pekerjaan. Motivasi awal itu didukung oleh program-program yang ditawarkan oleh sekolah yang lebih berorientasi pada pencapaian target nilai tinggi dalam test akhir untuk mendapatkan ijazah (score minded).

Kedua, kurikulum. Sekolah seringkali melakukan praktek-praktek yang berdalih pendidikan namun tidak jarang yang bertentangan dengan nilai pendidikan. Hal ini biasanya dilakukan melalui kurikulum yang oleh Illich (1999: 519) diistilahkan dengan hidden curriculum (kurikulum tersembunyi) di mana kurikulum tersebut selamanya berada diluar kendali sang guru ataupun kepala sekolahnya. Kurikulum tersebut berisi pesan bahwa individu tak bisa menyiapkan diri untuk hidup di masa dewasa dalam masyarakat tanpa sekolah, apa yang tidak diajarkan di sekolah berarti kecil nilainya atau tak bernilai sedikitpun, dan apa yang dipelajari di luar sekolah tak layak diketahui.

Dalam bentuk yang lebih spesifik lagi adalah adanya pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah yang

akan menyebabkan terjadinya pembunuhan kehendak banyak orang untuk belajar secara mandiri. Pengetahuan diperlakukan ibarat komoditas, dikemas-kemas dan dijajakan, diterima sebagai sejenis harta pribadi oleh yang menerimanya dan selalu langka di pasaran.

Penyimpangan tersebut menurut Freire (2001: 3) disebabkan ketidakmampuan seorang guru mendialektiskan daur gnosiologis (gnociological cycle), yang di dalamnya ada dua saat yang saling berhubungan yaitu, pertama adalah daur produksi atau membangun pengetahuan baru dan saat yang kedua adalah mengetahui ilmu yang sudah ada. Yang terjadi biasanya mendikotomisasikan; yakni menjadikan keduanya terpisah. Pengetahuan dilahirkan di tempat yang jauh dari siswa, yang diminta hanya untuk menghafalkan apa yang ditugaskan guru. Akibatnya, kita telah mereduksi makna mengetahui menjadi sekedar memindahkan pengetahuan yang sudah ada. Guru berubah status, yakni hanya menjadi pemindah ilmu saja. Lebih ekstrim lagi guru telah melakukan transaksi jual beli pengetahuan antara guru dan murid.

Ketiga, format lembaga. Sekolah diidentikkan dengan sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa kelas dan di dalamnya dipenuhi dengan meja dan kursi. Di sanalah tempat siswa menerima pengajaran dari guru, mulai dari jam 07.00 sampai dengan jam 14.00. siswa didekam dalam ruangan yang kaku dan menjemukan.

Namun ketika ada siswa yang tidak mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran atau ada seorang siswa tidak masuk kelas (bolos), maka dengan serta merta pihak sekolah baik guru atau kepala sekolah menyalahkan siswa yang

bolos tersebut dengan mengatakannya sebagai murid nakal, bodoh, suka bolos dan lain sebagainya. Tanpa menyadari apa penyebab timbulnya masalah tersebut. Apakah cara mengajarnya yang tidak bagus, ataukah karena suasana kelasnya yang seperti penjara atau mungkin ada masalah pribadi yang sedang dihadapi siswa. Kesemuanya itu haruslah diketahui oleh pihak sekolah supaya tidak semena-mena pada anak didik.

Keempat, lingkungan. Di sekolah setiap hari siswa selalu disuguhi tontonan persaingan yang tidak sehat dan tentunya tidak mendidik. Hal itu dipicu oleh adanya sistem ranking atau peringkat kelas. Pihak sekolah selalu menjadi motivator bagi siswanya supaya berlomba dengan teman-temannya untuk mendapatkan peringkat yang tertinggi. Sehingga siswa terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menjatuhkan teman-temannya supaya ia menjadi yang terbaik. Terlepas apakah cara yang ditempuh baik atau buruk. Tentu hal itu akan melahirkan siswa-siswa yang individualistis dan tidak mau bekerjasama dengan orang lain, apalagi membantu orang lain.

Wahono (2001: 107) menyarankan perubahan paradigma dan pendekatan dalam sitem pendidikan kita. Dari paradigma kompetitif berpendekatan sumber daya manusia diganti dengan paradigma keadilan sosial berpendekatan pemberdayaan manusia.

Kelima, Sistem evaluasi. Selama ini sistem evaluasi di sekolah lebih menekankan pada aspek kognitif daripada afektif dan psikomotorik. Sehingga siswa yang secara tidak memiliki kognitif yang baik akan selalu dirugikan meskipun afeksi dan psikomotoriknya bagus.

Dari realitas tersebut maka wajar kalau Reimer mengatakan bahwa sekolah sudah mati. Sesuatu dikatakan mati apabila ia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan sekolah dikatakan sudah mati apabila tidak lagi berfungsi sebagai sekolah.

Adapun fungsi sekolah banyak sekali rumusannya dalam keputakaan ilmu-ilmu pendidikan. Namun kita bisa meringkasnya dalam tiga rumusan dari Benyamin Bloom yang sudah kita kenal dengan taksonomi pendidikan sebagaimana telah dikutip oleh Topatimasang (1988:77) yaitu : membentuk watak dan sikap (*affective domain*), mengembangkan pengetahuan (*cognitive domain*) dan melatih keterampilan (*psychomotoric domain*). Namun realitasnya kita bisa menghitung berapa banyak alumni sekolah yang memiliki watak setengah manusia, seperempatnya hewan dan seperempatnya lagi setan. Berapa banyak temuan-temuan ilmu pengetahuan baru lahir dari sekolah dibandingkan dengan perusahaan atau dinas-dinas militer serta berapa banyak sarjana pendidikan yang menjadi kasir toko, sarjana teknik bangunan yang menjadi wartawan dan sarjana agama yang menjadi pemborong bangunan. Itu semua disebabkan ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki dari sekolah dengan realitas di lapangan, belum lagi yang tidak punya pekerjaan.

Dampak Sekolah terhadap Masyarakat

Untuk memahami dampak adanya sekolah terhadap masyarakat, kiranya perlu terlebih dahulu memahami karakteristik sosial masyarakat yang oleh Taruna (2000: 177) dikelompokkan menjadi empat struktur, yakni, struktur

komunikasi, sosiometrik, kekuasaan dan lokomosi.

Yang dipelajari dalam struktur komunikasi ialah keseluruhan pola hubungan sosial masyarakat, yakni bagaimana setiap orang/pribadi dalam komunitas sosial menjalin komunikasi terhadap orang lainnya. Ada tiga gejala umum yang terjadi, yakni setiap orang atau anggota masyarakat menjadi pusat komunikasi, menjadi orang pinggiran dan menjadi terisolasi.

Kegiatan pendidikan idealnya menjadikan setiap murid sebagai pusat komunikasi. Namun kenyataan di lapangan, sekolah tidak menjadikan murid sebagai pusat komunikasi melainkan guru dan kepala sekolah.

Kecerdasan dan prestasi murid sangat sering menjadi salah satu unsur penentu apakah seorang murid berada dalam pusat komunikasi, pinggiran atau terisolasi. Murid dengan tingkat kecerdasan yang pas-pasan, apalagi bodoh, mudah mengalami peminggiran. Wajar kiranya apabila murid yang tidak pandai mencari arti dan makna dirinya dari luar sekolah. Diantara proses di luar itu muncul sejumlah kegiatan destruktif untuk dirinya bahkan bagi masyarakat umum, seperti tawuran, narkoba, pemerkosaan dan sebagainya. Hal tersebut tidak mustahil; penyebab utamanya berasal dari sekolah.

Struktur sosiometrik, menjelaskan bahwa dalam masyarakat berkembang secara alamiah pola senang dan tidak senang. Merupakan hal yang wajar apabila seseorang merasa senang atau tidak senang terhadap orang lain. Begitu juga murid terhadap gurunya, sehingga tidak perlu ada suatu paksaan dari guru kepada murid untuk menyenangkan dirinya atau kepada mata pelajaran yang diajarkan, karena hal itu dapat

menyebabkan beban individual bagi siswa. Karena pendidikan adalah proses pembelajaran yang mengarahkan murid murid mampu menentukan pilihan atau keputusannya secara mandiri. Kalau struktur sosiometrik ini berjalan dengan baik maka tidak akan ada lagi generasi ABS (Asal Bapak Senang).

Struktur kekuasaan, menunjuk pada relasi kekuasaan yang ada dalam komunitas yang umumnya cenderung ditumpukan kepada seseorang tertentu saja. Misalnya saja, yang berkuasa terhadap sekolah adalah pengawas, yang berkuasa di sekolah adalah kepala sekolah dan yang berkuasa di kelas adalah guru. Estafet kekuasaan yang makin menekan kebawah seperti itu menghasilkan peserta didik sebagai pihak yang dikuasai tidak ada power sharing di sekolah. Sehingga pola-pola dialog baik didalam sekolah maupun diluar sekolah jarang sekali dilakukan. Pola-pola monolog seperti ini akan menciptakan murid yang pendiam dan tidak kritis.

Struktur lokomosi, menegaskan betapa besarnya peran, fungsi dan pengaruh aspek transportasi dan mobilisasi bagi karakteristik sosial masyarakat. Logika umum berkata bahwa makin banyak transportasi tentu akan makin cepat gerak orang dan tentunya akan semakin disiplin. Tetapi realitanya terbalik. Makin banyak transportasi kemacetan menjadi tontonan setiap hari. Dari realita itu para murid banyak belajar mengenai ketidak disiplin kendaraan-kendaraan dalam mengatasi kemacetan.

Di seluruh dunia, adanya sekolah justru berdampak anti edukasi terhadap masyarakat. (Illich, 2000:10). Oleh karena sekolah lalu diakui sebagai satu-satunya spesialis lembaga pendidikan. Kegagalan

sekolah dianggap oleh kebanyakan orang sebagai bukti bahwa pendidikan itu mahal sekali, sangat rumit dan hanya untuk segelintir orang.

Sekolah menyedot uang negara dalam jumlah yang banyak yang disediakan untuk pendidikan. Sementara lembaga-lembaga lain yang juga bertugas melaksanakan proses pendidikan dibiarkan terlantar sehingga makin lama makin lemah dan tidak bergairah menjalankan tugas mendidik anak. Kerja, waktu luang, politik, kehidupan kota dan bahkan kehidupan keluarga, semuanya tergantung kepada sekolah. Itupun hanya untuk memperoleh cara hidup dan pengetahuan yang diandaikan bisa diberikan di sekolah, dan bukannya lembaga-lembaga itu sendiri yang menjadi sarana pendidikan. Karena mereka beranggapan bahwa apapun bentuk pendidikan yang mereka lakukan tidak akan dihargai oleh lingkungannya, karena tidak mengeluarkan ijazah.

Akibat lebih jauh, muncul fenomena jual beli ijazah, jual beli title dan juga jual beli karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis maupun disertasi. Sehingga sekolah yang seharusnya menghasilkan ilmwan-ilmwan menjadi sarang dan pabrik plagiator!

Dampak di atas sebenarnya sudah disadari bahwa penyebabnya adalah sekolah. Namun tidak ada upaya untuk menggugat dalam bentuk riil misalnya meninggalkan sekolah secara sadar atau membentuk sistem baru yang lebih ideal. Hal itu disebabkan oleh sekolah yang sudah menjadi candu bagi masyarakat.

Idealitas Sistem Pendidikan; Sebuah Tawaran

Setelah melihat hal-hal yang telah

diperbuat oleh sekolah serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, maka ada keinginan untuk merancang atau melahirkan sistem baru yang ideal untuk diterapkan saat sekarang ini.

Beragam usulan dilontarkan oleh para kritikus pendidikan dalam menciptakan sistem yang lebih ideal. Ivan Illich misalnya menawarkan gagasan *descholarization* (penghapusan sekolah), Paolo Freire mengemukakan konsep *conscientization* (Penyadaran) dan banyak juga usul agar tanggung jawab pendidikan dipindahkan dari sekolah ke pundak media massa; hingga ke saran agar sekolah mengirimkan murid-muridnya magang. Sebagian lagi mengusulkan agar sekolah universal dihapus diganti dengan sistem baru yang kata mereka lebih tangkas menyiapkan orang untuk hidup dalam masyarakat moderen.

Bahkan Fidel Castro, presiden Kuba, ingin menghapus sikap yang mendewa-dewakan sekolah. Hal itu dinyatakan ketika ia berjanji bahwa pada tahun 1980 Kuba akan mampu menghapus universitasnya karena semua kehidupan di Kuba akan merupakan suatu pengalaman yang berisi pendidikan. Akan tetapi untuk sekolah menengah pertama dan atas, dia bersikap seakan-akan ini merupakan jalan yang dianggap sebagai usia sekolah yang harus ditempuh oleh semua orang. (Illich, 2000:10). Tentu hal itu merupakan pemikiran setengah hati yang masih berangkat dari asumsi bahwa sekolah adalah tempat terbaik dalam melaksanakan pendidikan.

Beberapa usul di atas bisa dimasukkan dalam tiga kategori : (1) reformasi ruang kelas dalam sistem persekolahan; (2) pembiakan sekolah bebas di seluruh masyarakat dan (3) transformasi seluruh

masyarakat menjadi satu ruang kelas raksasa. (Illich, 1999: 518)

Tidak ketinggalan pula Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang biasanya menyikapi problem-problem pendidikan dengan pendekatan kuantitatif seperti menambah anggaran dana, menambah jumlah guru atau menambah jumlah lokal sekolah dan sebagainya sehingga yang terjadi adalah involusi atau *mabniyun* (tetap :arab). Pada saat ini mencoba untuk melakukan perubahan secara kwalitatif. Hal itu tampak dari pembentukan Komite Reformasi Pendidikan (KRP) yang bertugas untuk membahas perubahan sistem pendidikan. Pembenahan-pembenahan itu tercermin dalam RUUSPN (Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional). Salah satu diantaranya mengenai prinsip pendidikan sebagaimana dikutip oleh Soebahar (2001:35-36) sebagai berikut:

Bab III : Prinsip Pendidikan Pasal 5

1. Pendidikan dilaksanakan sebagai suatu proses kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
2. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna, untuk memberikan berbagai peluang sebesar-besarnya kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan dirinya sesuai kebutuhan, kemampuan dan minatnya.
4. pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas *tutwuri handayani*, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam

- pengelololaannya.
5. Pendidikkan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Kalau kita perhatikan usulan di atas maka masih akan sulit terjadi perubahan secara mendasar. Karena usul tersebut bukanlah jawaban dari permasalahan yang terjadi. Begitu juga dengan prinsip pendidikan yang tertuang dalam RUUSPN Bab III pasal 5, sepertinya hanya akan menjadi idealitas tanpa realitas, karena beberapa alasan; pertama, belum adanya perangkat-perangkat operasional yang mendukung baik tenaga pengajar yang visioner dan revolusioner maupun kurikulum pendidikan yang membebaskan. Mengingat sekarang ini masih sering dijumpai praktek-praktek di kelas yang menggunakan pola pendidikan yang oleh Freire (2000: 54) diistilahkan dengan pendidikan bergaya Bank. Kedua, masih adanya dominasi sekolah terhadap lembaga-lembaga yang lain dalam melaksanakan proses pendidkkan, sehingga proses demokratisasi tidak akan berjalan. Ketiga, tidak adanya power sharing yang jelas dan seimbang di antara tiap-tiap komponen yang ada di sekolah, sehingga keterbukaan sulit terlaksana.

Maka jalan untuk melakukan transformasi menuju system pendidkkan yang ideal adalah melakukan sebuah revolusi system pendidikan. Dalam hal ini kita tidak bisa menunggu atau berharap dari hasil proses pendidikan di sekolah, karena pendidikan itu sendiri menurut Freire (2001: 35) bukanlah pemicu terjadinya transformasi atau revolusi. Namun revolusi itu yang

bersifat pedagogis.

Salah satu bentuk revolusinya adalah penghapusan dominasi lembaga tertentu dalam melaksanakan proses pendidikan serta pelepasan hak-hak istimewanya (privileges) dari pemerintah. Dengan begitu akan ada kesempatan yang sama pada setiap pranata baik keluarga, masyarakat dan sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan, bahkan bagi orang yang belajar secara mandiri (autodidak).

Sebagai konsekweksi dari penghapusan dominasi sekolah, maka pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil terhadap lembaga-lembaga yang ada. Baik dari segi proses, pengembangan atau pembinaan, dan out put yang dihasilkan oleh setiap lembaga. Melalui penghapusan ijazah atau dengan tidak menjadikan ijazah sebagai prasarat mendapat perlakuan istimewa baik untuk memperoleh pekerjaan maupun status sosial.

Ketika system yang semacam itu tercipta maka usulan penghapusan sekolah sudah kehilangan relevansinya. Karena setiap lembaga akan menjadi kompetitor yang baik bagi lembaga yang lain. Mereka akan terseleksi secara alamiah dan terakreditasi oleh konsumen secara langsung.

Begitu juga dengan orang yang lebih suka memilih belajar secara mandiri (autodidak) ia akan memperoleh perlakuan yang sama dengan orang yang memilih jalur lembaga. Cara seperti ini justru keberhasilannya banyak dibuktikan oleh sejarah, seperti yang dipaparkan oleh Dryden dan Vos (2001: 341) mengenai Albert Einstein yang dimasa kecilnya suka melamun dan dikenal orang yang tidak pandai di sekolahnya, akhirnya menjadi salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah.

Winston Churchill sangat lemah dalam pekerjaan sekolah, akhirnya menjadi salah satu pemimpin dan orator terbesar di abad ke-20. Serta Thomas Alva Edison yang dikeluarkan dari sekolah ketika baru tiga bulan dia masuk. Namun akhirnya menjadi penemu paling produktif sepanjang jaman. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang besar bukan karena sekolah.

Fakta-fakta di atas sekaligus meruntuhkan empat mitos dalam belajar seperti yang ditulis Dryden dan Vos (2001:448) yaitu : bahwa sekolah tempat terbaik dalam melaksanakan proses pendidikan, kecerdasan bersifat tetap, pengajaran menghasilkan pembelajaran dan kita semua belajar dengan gaya yang sama.

Kesimpulan

Sekolah mendominasi penyelenggaraan proses pendidikan serta mendapatkan hak-hak istimewa dari pemerintah baik dalam operasionalnya maupun out put yang dihasilkan. Dalam operasionalnya sekolah mendapat dana yang sangat banyak dari pemerintah dan dalam hal out put pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal. Mulai dari pekerjaan, peran-peran politik maupun status sosial. Sehingga banyak masyarakat yang terjerat masuk kedalam sistemnya dalam rangka ingin mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah maupun masyarakat melalui ijazah yang diterima.

Karena dominasi sekolah yang sangat kuat maka ia seolah-olah menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menyelenggarakan proses pendidikan sehingga keluarga dan masyarakat tidak berperan sebagaimana mestinya karena terlalu bergantung pada sekolah. Dan setiap kegagalan sekolah dianggapnya

sebagai kegagalan pendidikan secara umum yang akibatnya menanamkan benih anti pendidikan.

Untuk melahirkan system yang ideal maka dominasi sekolah harus segera diakhiri begitu juga dengan privilegges yang diterima harus segera dilepaskan. Sehingga ada kesempatan yan sama pada tiap-tiap lembaga untuk menciptakan dan menawarkan system terbaiknya. Konsekwensinya pemerintah harus menghapuskan system ijazah sekolah. Dengan begitu yang menjadi ukuran adalah kemampuan dan profesionalitas diri.

Daftar Pustaka

- Freire, Paolo, 2000, Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- , 2001, Sekolah Kapitalisme Yang Licik, Yogyakarta : LkiS
- Freire, Paolo dan Ira Shor, 2001, Menjadi Guru Merdeka; Petikan Pengalaman, Yogyakarta : LkiS
- Dryden, Gordon dan Jeanette Vos, 2001, Sekolah Masa Depan, Bandung : KAIFA
- Illich, Ivan, 1999, "Aternatif Persekolahan ", Menggugat Pendidikan, yogyakarta : Pustaka Pelajar
- , 2000, Bebaskan Masyarakat Dari Belunggu

Sekolah, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Soebahar, Abd. Halim, 2001, "Platform Reformasi Pendidikan Islam", Jurnal Al-Adalah (No.3 Volume 4), Jember : STAIN Jember

Topatimasang, Roem, 1988, Sekolah, Jakarta :

Taruna, Tukinan, 2000, "Pengembangan Masyarakat Dalam Konteks Pendidikan Untuk Semua", Menggagas Paradigma Baru pendidikan, Yogyakarta : Kanisius